

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Organisasi nonlaba adalah entitas yang tidak memiliki kepemilikan individu, di mana sekelompok orang bekerja secara kolektif untuk melayani kepentingan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini umumnya berasal dari sumbangan, donasi, serta iuran sukarela anggota, tanpa adanya tujuan untuk memperoleh imbalan atau keuntungan dari aktivitas yang dijalankan. Organisasi nonlaba dapat berbentuk badan amal, yayasan, lembaga sosial, maupun kelompok masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sejalan dalam memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat (Sopannah *et al.*, 2023). Berbeda dengan perusahaan komersial yang berorientasi pada laba, pengelolaan sumber daya dalam organisasi nonlaba tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat (Biduri, 2018).

Perkembangan dunia akuntansi di Indonesia tidak hanya berfokus pada entitas bisnis yang berorientasi laba, tetapi juga mencakup entitas nonlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nonlaba memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan dan pendidikan (Ramadhani *et al.*, 2025). Namun, pada praktiknya masih banyak yayasan yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Sebagian besar

pengurus yayasan bukan berasal dari latar belakang akuntansi profesional, melainkan relawan yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknis di bidang akuntansi. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan yayasan menyebabkan pencatatan dan pelaporan keuangan belum dilakukan secara optimal (Ramadhani *et al.*, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Pea *et al.*, (2025) dengan judul Model Pengendalian Keuangan NGO yang Efektif pada Yayasan Eran Sangbure Mayang juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan staf pengelola keuangannya tidak memiliki relevansi dengan bidang manajemen maupun akuntansi pada yayasan tersebut, sehingga proses pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya cukup memakan waktu. Akibat dari kondisi tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum bagi organisasi nonlaba.

Salah satu kasus penyalahgunaan dana pada yayasan pendidikan terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2025, sebagaimana diberitakan oleh media massa, di mana pengelola yayasan menemukan adanya transaksi keuangan yang tidak wajar dalam kegiatan operasional sekolah. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari pihak *vendor* terkait permintaan pengembalian kelebihan pembayaran ke rekening pribadi, yang kemudian memicu dilakukannya audit internal oleh yayasan. Hasil audit menunjukkan adanya manipulasi dokumen transaksi yang mengakibatkan kerugian finansial bagi yayasan. Peristiwa ini mencerminkan bahwa lemahnya pengaturan kewenangan, alur transaksi, serta

mekanisme pencatatan keuangan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yayasan pendidikan (CK2, 2025).

Permasalahan pengelolaan keuangan pada yayasan pendidikan masih menjadi isu yang serius di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025, ketika aparat penegak hukum mengungkapkan dugaan penggelapan dana sekolah yang melibatkan pengelola sekolah, yang teridentifikasi melalui hasil audit keuangan yayasan. Audit tersebut menemukan adanya manipulasi laporan keuangan, praktik *mark-up* biaya pendidikan, serta duplikasi pembayaran biaya operasional dalam jangka waktu yang panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaturan prosedur keuangan yang jelas, pemisahan tugas, serta mekanisme pengawasan yang memadai, pengelolaan keuangan yayasan pendidikan berpotensi mengalami penyimpangan. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penerapan prosedur operasional standar keuangan yang mengatur alur transaksi, kewenangan, dan dokumentasi secara sistematis guna memperkuat pengendalian internal yayasan pendidikan (Noviansyah, 2025).

Permasalahan serupa juga tercermin dalam polemik antara SMA Negeri 10 Samarinda dan Yayasan Melati Samarinda yang mencuat pada tahun 2021, di mana masyarakat melaporkan adanya indikasi ketidakjelasan pertanggungjawaban dana hibah pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, serta pihak ketiga. Dugaan tersebut muncul akibat tidak tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang memadai atas dana yang dikelola dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa yayasan

pendidikan yang mengelola dana publik memiliki tuntutan akuntabilitas yang tinggi, sehingga membutuhkan pedoman akuntansi yang jelas sebagai acuan dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Tanpa adanya pedoman akuntansi yang baku, informasi keuangan yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menyulitkan proses pengawasan serta pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (Rahayu, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa *et al.*, (2025) pada Yayasan Al-Qoyyim Sukoharjo bertujuan untuk memutakhirkan SOP pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan model pengembangan ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang sebelumnya hanya berupa dokumen sederhana belum mampu menggambarkan alur kerja secara jelas, sehingga diperlukan pembaruan SOP dalam bentuk *flowchart* agar proses pengelolaan kas menjadi lebih terstruktur, efisien, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pencatatan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumanireng & Utomo, (2023) pada Yayasan Satunama Yogyakarta menghasilkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Uang Muka dan Pertanggungjawaban Uang Muka sebagai upaya meningkatkan keteraturan proses kerja, mempermudah pengawasan, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SOP yang terdokumentasi dapat membantu

menciptakan alur kerja yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik antar bagian dalam organisasi. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada penyusunan SOP untuk aktivitas keuangan tertentu, yaitu permohonan dan pertanggungjawaban uang muka saja, belum mencakup pengelolaan keuangan yayasan secara lebih luas.

Berdasarkan hasil pra riset pada Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah, diketahui bahwa pengelolaan keuangan pada masing-masing jenjang pendidikan telah berjalan secara operasional, namun belum didukung prosedur operasional yang legal, terdokumentasi dan berlaku seragam. Selain itu, praktik pengelolaan dan pencatatan keuangan masih bergantung pada pemahaman masing-masing pengelola tata usaha yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan prosedur, ketidakkonsistenan pencatatan, serta melemahkan fungsi pengendalian internal yayasan. Oleh karena itu, proyek ini difokuskan pada penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) keuangan yang didukung pedoman akuntansi sederhana sebagai acuan tertulis dalam pengelolaan keuangan yayasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah,

Salah satu yayasan pendidikan yang telah memiliki tata kelola keuangan terstandarisasi yaitu Yayasan Pendidikan Islam Sunan Ampel Al-Muhsini di Jawa Timur. Yayasan ini mengelola beberapa lembaga pendidikan formal dari tingkat kanak-kanak hingga menengah atas dan telah menerapkan SOP tenaga administrasi keuangan yang mengatur tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta

alur kerja pengelolaan keuangan secara tertulis. Keberadaan SOP tersebut membantu menciptakan keseragaman prosedur, memperjelas mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban, serta mengurangi ketergantungan pada pemahaman masing-masing individu. Kondisi tersebut berbeda dengan Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah yang kegiatan pengelolaan keuangannya telah berjalan namun belum dibakukan dalam bentuk POS yang terdokumentasi dan berlaku seragam, sehingga menunjukkan pentingnya penyusunan POS keuangan sebagai acuan bersama.

B. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan komponen lingkungan pengendalian dalam *COSO Framework*, organisasi idealnya didukung oleh standar, proses, dan struktur yang jelas sebagai dasar pelaksanaan pengendalian internal (Sumarna & Novitasari, 2022). Berdasarkan konsep tersebut, pengelolaan keuangan yayasan idealnya didukung oleh prosedur operasional yang terdokumentasi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme otorisasi, serta pedoman pencatatan keuangan yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh pengelola keuangan. Keberadaan standar dan prosedur tertulis tersebut penting untuk menciptakan konsistensi pelaksanaan kegiatan keuangan, memperjelas kewenangan, serta mendukung terciptanya informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kondisi aktual, kegiatan keuangan di Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah telah mencakup berbagai transaksi seperti penerimaan kas dari SPP peserta didik dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengeluaran kas

untuk pembayaran gaji tenaga pendidik, pembelian perlengkapan, dan biaya operasional pada masing-masing unit pendidikan. Proses tersebut telah dijalankan oleh bendahara pada bagian tata usaha di setiap unit pendidikan serta didukung sistem pengarsipan dokumen menggunakan *ordner*. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan keuangan masih belum didukung prosedur tertulis yang mengatur alur proses, penggunaan dokumen, mekanisme pencatatan, dan pembagian kewenangan secara seragam. Pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan sederhana serta belum didukung pedoman akuntansi menyebabkan belum adanya acuan yang seragam terkait kebijakan pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik pengelolaan antar unit pendidikan, menurunkan konsistensi dan keandalan informasi keuangan, serta menyulitkan proses penelusuran data keuangan. Dari perspektif pengendalian internal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terstruktur dan terdokumentasi secara formal sehingga proses pengawasan belum berjalan optimal dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data keuangan. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara awal sebagai bagian dari analisi awal yang menyatakan bahwa “*yang urgent ini adalah masalah SOP keuangan*”, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pedoman tertulis yang mampu mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Pedoman tersebut tidak hanya berupa Prosedur Operasi Standar (POS), tetapi juga perlu didukung dengan pedoman kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan

akuntansi atas setiap transaksi keuangan. POS mencakup alur penerimaan kas, pengeluaran kas, serta pemeriksaan fisik dan pengawasan, sedangkan Pedoman Kebijakan Akuntansi memberikan arahan terkait pencatatan, pengakuan, serta contoh jurnal akuntansi pada saat terjadinya transaksi. Penyusunan POS dan Pedoman Kebijakan Akuntansi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan di seluruh unit pendidikan, sehingga tercipta keseragaman prosedur, peningkatan kualitas informasi keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yayasan dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan akuntabel.

C. Tujuan Proyek

Tujuan penulis membuat proyek ini adalah untuk:

1. Merancang Prosedur Operasi Standar (POS) Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah
2. Menyusun Pedoman Kebijakan Akuntansi sederhana sebagai acuan pencatatan transaksi keuangan yang mendukung penerapan POS Pengelolaan Keuangan Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah